WTO Trade Policy Review Ke-7: Indonesia Dukung Sistem Perdagangan Multilateral

Tanggal : Selasa , 22 Desember 2020
Media : Neraca
Halaman : 10
Wartawan : iwan, gro
Muatan Berita : Netral
Narasumber : Jerry Sambuaga *(Wakil Menteri Perdagangan)*
Rubrik : Industri & Perdagangan
Topik :

WTO Trade Policy Review ke-7: Indonesia Dukung Sistem Perdagangan Multilateral

Jakarta - Trade Policy Review (TPR) yang ke-7 untuk Indonesia di kantor World Trade Organization (WTO), Jenewa, Swiss. TPR ini berlangsung secara hybrid dengan dihadiri Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga sebagai Ketua Delegasi RI, Ketua Badan TPR WTO, dan Sekretariat WTO di kantor WTO di Jenewa. Sementara itu, discussant (Mexico) dan sekitar 42 wakil negara anggota WTO, yang memberikan pernyataan, menghadiri TPR secara daring.

■ **NERACA**

Ketua Delegasi RI, Jerry Sambuaga menyampaikan, Indonesia tetap mendukung sistem perdagangan multilateral di tengah merosotnya kepercayaan terhadap WTO. TPR kali ini merupakan kontribusi Indonesia kepada penguatan peran WTO dalam sistem perdagangan multilateral. TPR terakhir untuk Indonesia diadakan pada 2013, di tengah kesibukan Indonesia menangani keketuaan APEC, persiapan Konferensi Tingkat Menteri WTO ke-9 di Bali, serta dimulainya perundingan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).

Dalam TPR kali ini, Indonesia menerima lebih dari 900 pertanyaan tertulis dari anggota WTO, serta sejumlah pertanyaan tambahan yang disampaikan pada saat TPR berlangsung. Negara anggota WTO secara umum menyambut baik kinerja ekonomi Indonesia selama masa review, yakni dari 2014 sampai dengan pertengahan 2020.

Rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 5,1 persen, kinerja perdagangan luar negeri yang membaik, penurunan jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, perbaikan sebagian besar elemen kemudahan melakukan bisnis (ease of doing business), serta peranan Indonesia yang semakin menonjol dalam forumforum perdagangan bilateral, regional dan internasional merupakan hal-hal yang banyak diapresiasi oleh negara anggota WTO.

Penyelesaian perundingan RCEP baru-baru ini juga dipandang banyak negara WTO sebagai pencapaian milestone yang diraih Indonesia dalam kancah perdagangan dunia.

"Pencapaian RCEP menjadi perhatian khusus negara-negara anggota WTO karena Indonesia berhasil menuntaskan perundingan unilateral ini di tengah arus perubahan perdagangan dunia, yang antara lain ditandai oleh 'disrupsi' dari industri 4.0, digitalisasi ekonomi, perang dagang, aksi unilateralisime, serta meningkatnya hambatan-hambatan perdagangan antarnegara, yang memuncak dengan merebaknya pandemi Covid-19," papar Jerry.

Selain mendapatkan apresiasi, sejumlah kecil negara juga menyampaikan keprihatinannya terhadap beberapa kebijakan maupun praktik yang ditempuh Indonesia, seperti Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) yang dianggap sebagai kebijakan import quantitative restrictions.

Lalu, penerapan pre-shipment inspections, kurangnya transparansi dalam perizinan impor sejumlah produk, minimnya informasi mengenai ketentuan halal, pembatasan ekspor, Daftar Negatif Investasi. Kemudian, meningkatnya penggunaan instrumen trade remedy khususnya safeguard, dan secara umum kurangnya penerapan Good Regulatory Practices (GRPs).

Indonesia menjelaskan bahwa beberapa kebijakan yang ditempuh merupakan pengejawantahan dari aspirasi Indonesia untuk 'menaiki' rantai nilai global (Global Value Chains/GVCs) agar Indonesia tidak tinggal diam pada anak tangga terbawah dengan hanya mengekspor produk-produk primer atau bahan baku saja. "Kami jelaskan bahwa menaiki anak tangga GVCs merupakan keinginan Indonesia dan negara berkembang lainnya untuk dapat lebih menyejahterakan rakyatnya. Indonesia akan menghargai masukan dari negara anggota WTO lainnya apabila ada rute lain yang dapat ditempuh," jelas Jerry. ●

iwan/gro